PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja | Hari: Senin | Tanggal: 07 Maret 2016 | Halaman: 15

Peta Geospasial untuk RTLH

■ Disusun Bappeda Yogya untuk Mudahkan Penataan

YOGYA, TRIBUN - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta bakal membuat peta geospasial untuk memetakan permukiman rumah tidak layak huni (RTLH). Pemetaan bertujuan untuk mengetahui sebaran rumah layak huni yang berada di kota setempat.

"Kami akan melakukan pendekatan dari rumah tidak layak huni yang kami tuangkan dalam peta geospasial. Jadi nanti, sebaran rumah tidak layak huni akan dituangkan dalam peta, jadi akan mudah penanganannya," ujar Edy Muhammad, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Minggu (6/3).

Edy memaparkan, pemetaan rumah tidak layak huni di Kota Yogyakarta ini bakal mengelompokkan setiap jenis lahan yang berada pada kawasan tertentu melalui warna pada peta. Misalnya, pengelompokkan Sultan Ground ataupun Pakualaman Ground, *wedi gengser* (tanah milik pemerintah), ataupun tanah hak milik. "Rumah yang ada di kawasan Keraton, diberi warna merah. Rumah hak milik Sultan Ground berwarna biru, tanah *wedi gengser* warna lain. Inu yang akan menjadi referensi bagi Bappeda untuk penataan," tutur Edy.

> **Jadi nanti, sebaran rumah tidak layak huni akan dituangkan dalam peta, jadi akan mudah penanganannya.**
>
> **Edy Muhammad**
> Kepala Bappeda Yogya

Lanjut Edy, sebaran rumah tidak layak huni dapat diketahui apakah menempati kawasan-kawasan yang sesuai atau tidak sesuai peruntukannya. Jadi, penataan kawasan dapat dilakukan secara efektif.

"Bagaimana penataanya, ya untuk tanah hak milik supaya lebih layak lagi rumahnya, yang tanah Keraton bisa koordinasi dengan pihak Keraton, tanah negara melalui pendekatan sosial keruangan. Hal ini dilakukan supaya tidak menimbulkan dampak sosial yang tinggi," ujar Edy.

Merujuk kepada pemetaan geospasial pada tahun 2014, Bappeda Kota Yogyakarta melaporkan sebanyak 3.300 rumah di Kota Yogyakarta merupakan rumah tidak layak huni. Tren ini semakin naik, sebanding dengan tren pertumbuhan penduduk yang juga semakin tinggi.

Sedangkan untuk kepadatan penduduk, Kota Yogyakarta luasan wilayhnya 32,5 kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk mencapai 17.005 jiwa per kilometer persegi yang sudah masuk kepada golongan cukup padat.

"Sudah cukup padat penduduk, secara dibandingkan luas kota sebesar 32,5 km persegi dan tidak mengalami pertambahan sedangkan sekarang sudah diisi 17.005 jiwa per km persegi. Untuk itu, tren pertumbuhan penduduk dibanding jumlah yang ada, kita akan sesuaikan nanti kebutuhan perumahannya berapa," ujar Edy.

Edy menuturkan, rumah susun menjadi salah satu solusi yang dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni di Kota Yogyakarta. Pasalnya, pembangunan horizontal justru akan menghabiskan banyak lahan, dibanding pembangunan vertikal.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, mengatakan, pihaknya pun akan merekomedasikan pembangunan rumah susun untuk menyiasati keterbatasan lahan yang ada. Menurutnya, perumahan vertikal dapat menjadi solusi kebutuhan perumahan penduduk.**(rfk)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005